Jurnal Budi Pekerti Agama Islam
Volume. 2, No. 5 Oktober 2024
e-ISSN: 3031-8343; p-ISSN: 3031-8351, Hal 284-296
DOI : https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.561
Available online at : https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai

Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Yudi Agung Franata, Andi Zainal Abidin, Kasful Anwar US, Sya'roni
Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: yagungfranata@gmail.com, andizainalabidin@gmail.com, kasfulanwarus@uinjambi.ac.id, syaroni@uinjambi.ac.id

Alamat: Jln. Arif Rahman Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
Korespondensi penulis: yagungfranata@gmail.com

Abstract : *This study focuses on discussing the politics and policy of Islamic education in Indonesia with the core of the discussion of Comparison of Educational Goals and Systems between Islamic Education and Dutch Colonial Government Education. The history of Islamic education in Indonesia is more or less influenced by the socio-political background, especially during the Dutch colonial era, which was the longest surviving colonizer in Indonesia, this caused damage to the Islamic order that existed in Indonesia at that time, because the Dutch colonialists had a dual mission including Imperialism (a nation that carried out the politics of colonizing other nations) and Christianization. The educational process that took place in the Dutch East Indies was one of the starting points for the emergence of national awakening figures. Education in the Dutch East Indies itself began because of criticism from several figures and groups with the application of forced cultivation and liberal politics, because this policy caused a lot of suffering and poverty of the people. And this must be paid for by organizing trias, namely irrigation, emigration, and education. This criticism was finally approved by the queen of the Netherlands, and education began to be held, but education ran with discrimination because there were schools that differentiated classes between the children of elite nobles or pro-Dutch figures and the children of ordinary people. And this is because the son of this nobleman or pro-Dutch figure will later work to help the Dutch. And the children of ordinary people only become menial or lowly laborers.*
Keywords : *Islamic Education System, Dutch Colonial Government Education*

Abstrak : Penelitian ini fokus untuk membahas mengenai politik dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan inti pembahasan Perbandingan Tujuan Dan Sistem Pendidikan Antara Pendidikan Islam Dan Pendidikan Pemerintah Colonial Belanda. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sedikit banyak di pengaruhi oleh latar belakang sosial politik, apalagi ketika zaman penjajahan Belanda, yang merupakan penjajah paling lama bertahan di Indonesia, hal ini menyebabkan kerusakan tatanan keislaman yang sudah ada di Indonesia saat itu, karena kaum kolonial belanda mempunyai misi yang ganda diantaranya Imperialis (Bangsa yang menjalankan politik menjajah Bangsa lain) dan kristenisasi. Proses pendidikan yang berlangsung di Hindia Belanda adalah salah satu titik awal munculnya tokoh kebangkitan bangsa. Pendidikan di Hindia Belanda sendiri diawali karena kritik dari beberapa tokoh dan golongan dengan diterapkan nya tanam paksa dan politik liberal, karena dalam kebijakan ini menimbulkan banyak penderitaan dan kemiskinan rakyat. Dan hal ini harus dibayar dengan menyelenggarakan trias yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kritikan ini pun akhirnya di setujui ratu Belanda, dan pendidikan pun mulai digelar namun pendidikan berjalan dengan diskriminasi karena terdapat sekolah yang membedakan kelas anatara anak elite bangsawan atau tokoh yang pro Belanda dengan anak rakyat biasa. Dan hal ini karena anak bangsawan atau tokoh pro belanda ini nantinya akan bekerja untuk membantu Belanda. Dan anak rakyat biasa hanya menjadi pekerja kasar atau rendahan.
Kata kunci : Sistem Pendidikan Islam, Pendidikan Pemerintah Colonial Belanda

1. LATAR BELAKANG

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia sedikit banyak di pengaruhi oleh latar belakang sosial politik, apalagi ketika zaman penjajahan Belanda, yang merupakan penjajah paling lama bertahan di Indonesia, hal ini menyebabkan kerusakan tatanan keislaman yang sudah ada di Indonesia saat itu, karena kaum kolonial belanda mempunyai misi yang ganda

Received Juni 14, 2024; Revised Juni 28, 2024; Accepted Juli 11, 2024; Online Available Juli 13, 2024
** Yudi Agung Franata, yagungfranata@gmail.com*

diantaranya Imperialis (Bangsa yang menjalankan politik menjajah Bangsa lain) dan kristenisasi.

Memang diakui bahwa belanda cukup banyak mewarnai perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Cukup banyak peristiwa di Indonesia, baik sebagai pedangang, perorangan kemudian diorganisasikan membentuk kongsi-kongsi dagang yang diberi nama VOC, maupun sebagai aparat pemerintah yang menjajah dan berkuasa. Oleh sebab itu, wajar bila kedatangan mereka mendapat tantangan dan perlawanan dari penduduk pribumi, raja-raja, dan tokoh agama setempat.

Hegemoni kolonialisme yang ada di dunia Muslim, termasuk Indonesia, telah melahirkan berbagai persolan yang cukup kompleks. Karena selain adanya pengekangan terhadap aktivitas ritual-keberagamaan, pendidikan juga menjadi target Kolonial untuk dibekukan. Akan tetapi, di Indonesia proses ini justru tidak bisa dilakukan oleh para Kolonial, karena dominasi kaum intelektual Muslim Indonesia yang "tidak rela" dengan kehadiran Kolonialisme di Indonesia. Kaum intelektual Muslim Indonesia pada saat itu, mencoba membentuk organisasi-organisasi Islam sebagai media penyadaran umat Islam. Yang menjadi menarik pada masa ini adalah adanya perbedaan semangat perjuangan antara satu organisasi dengan organisasi Islam lainnya, sehingga membentuk sebuah "watak" atau model yang berbeda pula dalam melakukan penyadaran umat Islam tersebut.

Kolonialisme merupakan suatu usaha untuk mengusai wilayah bangsa lain yang bertujuan untuk menguras atau mendapatkan sumber daya suatu bangsa yang di kuasai demi pengolahan industrialisasi di Negara kolonisator. Dalam hal ini kesejahteraan maupun pendidikan di daerah koloni tidak diperhatikan. Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pendidkan Islam

1. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakekat pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang :

a. Memperhatikan sifat-sifat dasar manusia yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai potensi bawaan seperti fitrah, bakat minat, dan karakter yang berkecenderungan pada Al-Hanif (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam.

b. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal kehidupan di akherat.31

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk kepribadian muslim kepada generasi muda Islam khususnya dan generasi yang akan datang pada umumnya yang bertanggung jawab terhadap moral dan agama yang dianutnya untuk dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Tujuan pendidikan Islam adalah "membentuk manusia yang berj asmani kuat atau sehat dan terampil, berotak cerdas dan berilmu banyak, berhati tunduk kepada Allah SWT, serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi dan pendirian yang teguh". untuk menciptakan manusia yang mengabdi kepada Allah SWT, mewujudkan generasi yang beriman dan bertaqwa, beramal shaleh, berakhlak mulia, serta mampu berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri kepribadian muslim sejati. Dengan pengabdian itu manusia akan mendapat keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebagaimana yang telah dicita-citakan setiap muslim sesuai dengan kehidupan yang diingini.

Jika mengingat betapa luhur tujuan pendidikan Islam tersebut, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk kembali kepada khiththah pendidikan Islamnya. Apalagi keberadaan pendidikan Islam di era globalisasi ini harus mampu menjadi mitra perkembangan dan pertumbuhannya, bukan menjadi *counter attack* yang justru akan berseberangan dengan semakin pesatnya kemajuan. Sebab, era ini akan terus berjalan maju dan tidak akan mengenal siapapun yang akan menjadi penikmatnya, dan kemajuannya akan mampu menggilas dan menggerus apapun yang menghalanginya. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang nyata terjadi di era digital informasi yang menjadikan dunia ini terasa sempit. Maka pendidikan Islam seharusnya membuka wacana sebuah pendidikan global yang mampu mengantarkan generasi muslim pada sebuah peradaban modern.

2. Ciri ciri tujuan pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas- tugas memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.

b. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
c. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya.
d. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya.
e. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.
f. Tujuan pendidikan Islam adalah membina dan memupuk akhlakul karimah. sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

3. Prinsip-Prinsip Dalam Formulasi Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam mempunyai prinsip-prinsip tertentu guna menghantar tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip itu adalah: 33

a. Prinsip universal (*syumuliyah).* Prinsip yang memandang keseluruh aspek agama (aqidah, ibadah dan ahklak, serta muamalah), manusia (jasmani, rohani, dan nafsani), masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta adanya wujud jagat raya dan hidup.
b. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan (tawazun qaiatishadiyah) prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi, berbagai kebutuhan individu serta tuntunan pemeliharaan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik untuk menyelesaikan semua masalah dalam menghadapi tuntutan masa depan.
c. Prinsip kejelasan (tabayun) prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hokum yang member kejelasan terhadap kejiwaan manusia.
d. Prinsip tak bertentangan. Prinsip yang didalamnya terdapat ketiadaan pertentangan berbagai unsure dan cara pelaksanaannya sehingga antara satu komponen dengan komponen yang lain saling mendukung.
e. Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan.
f. Prinsip perubahan yang diingini.
g. Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu.
h. Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pelaku pendidikan serta lingkungan dimana pendidikan itu dilaksanakan.

4. Formulasi Tujuan Pendidikan Islam

Upaya dalam mencapai tujuan pendidikan harus dilaksanankan dengan semaksimal mungkin, walaupun pada kenyataannya manusia tidak mungkin menemukan kesempurnaan dalam berbagai hal. Tujuan pendidikan Islam dapat diklarisifikasikan menjadi empat dimensi, yaitu:

a. Tujuan pendidikan jasmani. Mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas kholifah dibumi, melalui ketrampilan-ktrampilan fisik
b. Tujuan pendidikan rohani. Meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya kepada allah SWT semata dan melaksanakan moralitas yang ditaladani oleh Nabi SAW.
c. Tujuan pendidikan akal. Pengarahan inteligensi untuk menemukan kebenaran sebab-sebabnya dengan talaah tanda-tanda kekuasaan allah dan menemukan pesan-pesan ayatnya yang berimplikasi kepada peningkatan iman kepada sang pencipta.
d. Tujuan pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian komonitas sosial. 34

5. Komponen-Komponen Tujuan Pendidikan Islam

Secara teoritis, tujuan akhir dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu : 35

a. Tujuan Normatif yaitu Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan norma-norma yang mampu mengkristalisasikan nilai-nilai yang hendak diinternalisasi, misalnya :
    1) Tujuan formatif yang bersifat memberi persiapan dasar yang korektif.
    2) Tujuan selektif yang bersifat memberikan kemampuan untuk membedakan hal-hal yang benar dan yang salah.
    3) Tujuan determinatif yang bersifat memberi kemampuan untuk mengarahkan dari pada sasaran- sasaran yang sejajar dengan proses kependidikan.
    4) Tujuan integratif yang bersifat memberi kemampuan untuk memadukan fungsi psikis (pikiran, perasaan, kemauan, ingatan, dan nafsu) kearah tujuan akhir.
    5) Tujuan aplikatif yang bersifat memberikan kemampuan penerapan segala pengetahuan yang telah diperoleh dalam pengalaman pendidikan.
b. Tujuan Fungsional. Tujuan yang sasarannya diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk memfungsikan daya kognisi, afeksi, dan psikomotorik dari hasil pendidikan yang diperoleh, sesuai dengan yang ditetapkan. Tujuan ini meliputi :

1) Tujuan individual, yang sasarannya pada pemberian kemampuan individual untuk mengamalkan nilai-nilai yang telah diinternalisasikan kedalam pribadi berupa moral, intelektual dan *skill.*
2) Tujuan sosial, yang sasarannya pada pemberian kemampuan pengamalan nilai-nilai kedalamm kehidupan sosial, interpersonal, dan interaksional dengan orang lain dalam masyarakat.
3) Tujuan moral, yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan moral atas dorongan motivasi yang bersumber pada agama (teogenetis), dorongan sosial (sosiogenetis), dorongan psikologis (psikogenetis), dan dorongan biologis (biogenetis).
4) Tujuan profesional, yang sasarannya pada pemberian kemampuan untuk mengamalkan keahliannya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
5) 3. Tujuan Operasional. Tujuan yang mempunyai sasaran teknis manajerial. Menu rut langeveld, tujuan ini dibagi menjadi enam macam, yaitu :
    a. Tujuan umum (tujuan total), menurut Kohnstam dan Guning, tujuan ini mengupayakan bentuk manusia *kamil*, yaitu manusia yang dapat menunjukan keselaraasn dan keharmonisan antara jasmani dan rohani, baik dalam segi kejiwaan, kehidupan individu, maupun untuk kehidupan bersama yang menjadikan integritas ketiga ini hakikat manusia.
    b. Tujuan khusus, tujuan ini sebagai indikasi tercapainya tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan tertentu, baik berkaitan dengan cita-cita pembangunan suatu bangsa, tugas dari suatu badan atau lembaga pendidikan, bakat kemampuan peserta didik, seperti memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik untuk bekal hidupnya setelah ia tamat, dan sekaligus merupakan dasar persiapan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya.
    c. Tujuan tak lengkap, tujuan ini berkaitan dengan kepribadian manusia dari suatu aspek saja, yang berhubungan dengan nilai-nilai hidup tertentu, misalnya kesusilaan, keagamaan, keindahan, kemasyarakatan, pengetahuan, dan sebagainya.
    d. Tujuan insidental (tujuan seketika), tujuan ini timbul karena kebetulan, bersifat mendadak, dan besifat sesaat, misalnya mengadakan sholat jenazah ketika ada orang yang meninggal.

e. Tujuan sementara, tujuan yang ingin dicapai pada fase-fase tertentu dari tujuan umum, seperti fase anak yang tujuan belajarnya adalah membaca dan menulis, fase manula yang tujuan-tujuannya adalah membekali diri untuk menghadap ilahi, dan sebagainya.
f. Tujuan intermedier, tujuan yang berkaitan dengan penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan demi tercapainya tujuan sementara, misalnya anak belajar membaca dan menulis, berhitung dan sebagainya.

Sistem pendidikan merupakan rangkaian dari sub sistem-sub sistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Keberadan satu unsur membutuhkan keberadaanunsur yang lain, tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu proses pendidikan menjadi terhalang, sehingga mengalami kegagalan.

Ketika satu unsur dominan mendapat pengaruh tertentu, pada saat yang bersamaan unsur-unsur lainnya menjadi terpengaruh. Kemudian kita bisa membayangkan, bagaimana mudahnya bagi pendidikan Barat modern mempengaruhi sistem pendidikan Islam dengan cara mempengaruhi substansi tujuan pendidikan Islam terlebih dahulu. Berawal dari penggarapan tujuan ini, untuk berikutnya akan lebih mudah mempengaruhi unsur-unsur lainnya.

Demi kepentingan antisipasi terhadap meluasnya pengaruh Barat terhadap pendidikan Islam kendatipun terlambat, kita masih perlu meninjau system Pendidikan Islam. Dengan demikian, identitas, karakter dan kemandirian sistem pendidikan Islam tersebut menjadi jelas. Ada pola-pola dasar dari Islam sendiri untuk mengkerangkai bangunan sistem pendidikan Islam. Dengan begitu sistem pendidikan Islam yang ditawarkan sebagai alternatif itu benar-benar murni dan inspirasi petunjuk wahyu, bukan asal ambil sana sini yang dianggap baik lalu disentesiskan. Jika kondisi terakhir ini yang terjadi, maka tentu tidak layak diklaim sebagai sistem pendidikan Islam. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, kita melihat paling kurang terdapat lima macam tipologi pesantren. Pertama, lembaga pendidikan pesantren yang bersifat salafi, yaitu lembaga pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan agama dengan bersandar pada kitab-kitab klasik dengan menggunakan sistem halaqah, sorogan dan bandongan. Kedua, lembaga pendidikan pesantren yang selain memiliki ciri-ciri pesantren salafi sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengadopsi sistem madrasah, walaupun muatan kurikulumnya sepenuhnya agama. Ketiga, lembaga pendidikan pesantren yang selain memiliki sistem madrasah juga sudah melengkapinya dengan sistem sekolah umum yang memungkinkan santrinya dapat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, baik pada Perguruan Tinggi Agama maupun pada Perguruan Tinggi Umum.

Keempat, sistem pendidikan pesantren yang sudah melengkapi dirinya dengan keunggulan dalam penguasaan bahasa asing dan teknologi modern, sehingga lulusannya juga dapat diterima di lapangan kerja modern. Kelima, sistem pendidikan pesantren yang santrinya diarahkan untuk menjadi tenaga kerja profesional yang dibutuhkan oleh masyarakat. pada pesantren model yang kelima ini, para lulusannya diarahkan untuk bekerja secara mandiri pada sektor informal.

Dengan melihat dinamika sistem pesantren yang demikian itu, tidaklah mengherankan jika tamatan pesantren saat ini sudah dapat melakukan berbagai peran yang demikian besar dalam konstelasi dan percaturan politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni, di samping peran keagamaan, dan lain sebagainya.

B. Pendidikan Kolonial Belanda

1. Awal Pelaksanaan Pendidikan Untuk Bumiputera Masa Pemerintahan Kolonial Tahun 1900-1930

Pada tahun 1899, artiikel karya Van Deventer terbit dalam majalah De Gids. Artikel tulisan Van Deventer memilik judul "Hutang Kehormatan", artikel ini berisi tentang pemikiran Van Deventer mengenai keuntungan Hindia Belanda selama menjajah bangsa Indonesia dan hendaknya semua itu dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Dan akhirnya pada 1901 pemikiran dari Van Deventer ini dapat tertuang dalam pidato ratu Belanda (kusmayadi: 145)

Setelah ratu Belanda mengambil pemikiran Van Deventer dan dimasukan kedalam pidato nya memunculkan ide atau ekspresi yang dipandang sebagai suatu ide baru atau praktek politk baru yang biasa disebut sebagai politik etis atau politik balas jasa. Namun politik etis ini sangat bertentangan dengan eksploitasi materi yang dilakukan pemerintahan Kolonial, karena politik etis ini lebih menonjolkan bahwa adanya sikap kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi terhadap bangsa yang tertindas (Nasution: 15) Selain karena adanya model politik baru yakni politik etis pada abad ke 20 sendiri Belanda mengalami resesi ekonomi yang meluas, namun perekonomian liberal dan administrasi politik penjajahan di hindia belanda malah makin meluas. Dan membuat golongan bumiputera kesejahteraanya merosot terutama di jawa. Sehingga akhirnya pada 15 oktober 1902 dibentuk komisi penyidik (Mindere Welvaart Commissie). Administrasi politik yang makin meluas, perekonomian yang makin meluas dan kesejahteraan golongan bumiputera yang merosot, tiga faktor ini yang menjadi dasar munculnya politik etis ala Van Deventer atau politik asosiasi ala snouck hurgronje saat menjelang abad 20. Inti politik ini adalah tanpa menjadi orang eropa atau barat tapi dapat memanfaatkan berkah bangsa barat. Hal ini sangat bermanfaat untuk perkembangan dunia

pendidikan dan teknologi untuk golongan bumiputera. Bagi seluruh penganut politik etis pendidikan pemegang peranan utama.

Hal ini tercermin dalam trilogi pemerintah penjajahan yakni pendidikan, irigasi dan transmigrasi (educatie, irrigatie, emigratie). Dan bahasa belanda digunakan sebagai bahasa pengantar, dengan sistem ini golongan bumiputera kalangan atas atau anak para penjabat pro Belanda yang diuntungkan. Dulu nya bahasa belanda didorong digunakan sebagai bahasa pengantar namun pada abad XX pergeseran pendidikan bersifat barat. Dan penggunaan bahasa belanda tidak lagi di dorong namun lebih karena perkembangan objektif dibidang ekonomi, politik dan sosial-budaya.

Namun sosialbudaya perlu digaris bawahi karena kenyataan nya bahasa daerah dan melayu sudah tidak memainkan peran nya dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Cepatnya pergeseran pendidikan bumiputera kesifat barat mendorong munculnya beberapa tokoh liberal pembaharu, terutama Mr. J.H Abendanon dan A.W.F Idenburg. Abandon menjabat sebagai direktur penidikan, agama, dan industri (1900-1905), Idenburg menjabat menteri jajahan (1902- 1905). Belum lama bertugas Abendanon sudah mampu mengurangi biaya sekolah bagi murid bumiputera yang bersekolah di ELS (sekolah dasar eropa). Melalui sekolah ini Abendon pun merancang pendidikan calon ibu yang baik untuk gadis di jawa. Salah satu yang memanfaatkan kesempatan pendidikan ini dengan baik adalah R.A Kartini, lalu beliau bersekolah di ELS Jepara. Pada 1900 sebelum datangnya abendanon, sekolah raja dipertegas menjadi sekolah calon pegawai (Opleidingsschool voor indlansche ambtenaren-OSVIA) karena sulitnya menyampaikan hukum kepada pejabat bumiputera dalam bahasa pengantar melayu dan bahasa daerah, padahal masalah hukum mulai diserahkan kepada mereka. Akhirnya untuk mengatasi masalah ini sekolah raja dipertegas yakni mendidik calon pegawai menggunakan bahasa belanda tidak peduli anak pembesar atau tidak. Hal ini pun berdampak akhirnya yang bisa masuk hanya lulusan ELS atau sederajat. Dengan hal ini abendanon melihat, bila dengan kebijakan ini maka lulusan sekolah dasar kelas dua (tweede klase) sangat mustahil untuk bisa masuk OSVIA.Sehingga Abendanon pada 1903 mengizinkan calon murid OSVIA untuk masuk ELS secara gratis. Perubahan lain yang terjadi adalah sekolah guru di Bukit Tinggi pada 1904 abendanon dapat menetapkan bahasa belanda sebagai bahasa pengantar di dua kelas tertinggi.

2. Tingkatan Pendidikan Pada Masa Kolonialisme Tahun 1900-1930

Pada tahun 1904 muncul seorang gubernur jendral baru bernama J.B. Van Heutsz, dia adalah seorang pahlawan Belanda dalam Perang Aceh. Van Heutsz ingin merubah Pendidikan selama empat tahun agar lebih praktis, terutama untuk Bumiputra. Yang dimaksud praktis

adalah dengan mendirikannya sekolah kejuruan. Didirikannya sekolah kerajinan rumah tangga oleh regent Ngawi R.M.T. Utoyo, khususnya yang memiliki keahlian mengolah bahan seperti, kayu, kulit, bambu, maupun anyaman. Akan tetapi sistem pendidikan tidak mudah diubah menjadi arah yang lebih praktis. Oleh karena itu Dirk Fock pengganti Indenburg sebagai Menteri Jajahan meminta agar mengadakan penelitian bagi pendidikan. Tidak hanya untuk Sekolah Kejuruan tetapi juga sekoalah lainnya. Mr.J.G.Poot pengganti Abendanon menunjuk J.E.Jasper untuk memimpin penelitian tersebut. Pada April 1906 Jasper melaporkan tentang apa yang dikhawatirkan Snouck Hungronje terhadap Sekolah Kejuruan atau Sekolah Teknik yang belum memiliki tenaga kerja terdidik.

Jika Bumiputra dididik oleh sekolah tersebut maka penyaluran hanya akan terbatas. Sedangkan hadirnya tenaga didik lama-kelamaan akan mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan belajar Sekolah Kejuruan sekitar tiga tahun. Laporan dari Jasper juga berpendapat bahwa yang nantinya menjadi murid hanyalah lulusan kelas dua. Maka dikenal dua macam Sekolah Teknik yaitu "balai latihan" (ambachtsleergang) yang terbuka untuk lulusan Sekolah Dasar Kelas Dua, dan "Sekolah Teknik" (ambachschool) yang terbuka untuk lulusan ELS atau sederajat. Lama belajar "balai latihan" sekitar tiga tahun untuk mendidik muridnya menjadi kepala tukang, dan dua tahun untuk spesialisasi seperti tukang batu, mebel, montir, dan listrik. Gubernur Jendral Van Heutsz membuat penelitian terhadap Sekolah Dasar Kelas Satu, apakah tujuan telah berfungsi sebagai pengembangan potensi dan tingkat peradaban anak-anak Bumiputra. Masa belajar Sekolah Dasar Kelas Satu ditingkatkan yang awalnya lima tahun menjadi enam tahun. Karena pendidikan bahasa Belanda yang kurang dikuasai, memerlukan peningkatan untuk pembelajaran bahasa Belanda.

Sedangkan untuk Sekolah Dasar Kelas Dua masa belajarnya dikurangi karena terlalu mahal untuk anak Bumiputra yang belajarnya lima tahun menjadi tiga tahun. Setelah itu perlu dibangun Sekolah Rakyat (volkschool) atau disebut juga dengan Sekolah Desa (desaschool) untuk melayani orang yang ingin bersekolah yang masa belajarnya tiga tahun. Untuk peresmian Sekolah Desa terdapat tiga syarat, yaitu Sekolah Desa dibangun dan gurunya digaji rakyat desa, sedangkan pemerintah hanya membantu untuk sarana belajar dan uang. Syarat kedua pembangunan harus melewati masa percobaan. Syarat ketiga tidak boleh memaksa muridnya untuk bersekolah, Sekolah Desa diresmikan pada Maret 1906.Percobaan Sekolah Desa dilakukan di empat kabupaten yaitu, Priangan, Cirebon, Kedu, dan Kediri yang terjadi pada bulan Mei 1906. Percobaan Sekolah Desa tersebut berfungsi sebagai salah satunya upaya mengembalikan kemakmuran masyarakat Bumiputra. Setelah itu Sekolah Desa dilakukan di

Aceh dan menyebar ke seluruh Nusantara yang menyebabkan 40% anak usia 6-9 tahun merasakan bersekolah.

3. Tingkatan Pendidikan Pada Masa Kolonialisme Tahun 1900-1930

1) Sekolah dasar berbahasa belanda untuk bumiputera

Pada 16 februari 1914 keluarlah keputusan yang menetapkan perubahan untuk sekolah dasar de eerste klasse menjadi HIS (Holland inlandsche School) yang lama belajarnya selama tujuh tahun dan berbahasa belanda, sekolah ini diperuntukkan untuk anak kalangan elite pribumi. Dan di desa pun juga terdapat sekolah yang bernama sekolah desa (volkschool) dan dalam pendidikannya berlangsung tiga tahun dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar Setelah 8 tahun berjalan para lulusan sekolah desa merasa tidak puas dengan tingkat pendidikan yang sudah diperoleh dan ingin melanjutkan namun mereka tidak memenuhi persyaratan. Hingga akhirnya pada 1915 pemerintah pun membentuk sekolah baru yang diberi nama vervolgschool dengan lama belajar dua tahun dan mempersiapkan lulusan sekolah desa untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Namun ternyata yang memerlukan pendidikan lanjutan bukan hanya sekolah desa namun HIS juga memerlukan sekolah lanjutan sehingga dibentuk lah MULO dan resmi menjadi sekolah pada 1914. Dan yang boleh melanjutkan ke MULO adalah lulusan sekolah rendah, kecuali sekolah desa. Pada tahun 1920 K.F. Creutszberg, Direktur Pendidikan, Agama dan Industri beliau memiliki ide untuk membuat sekolah yang menghubungkan langsung antara sekolah desa dengan MULO dan tercetuslah ide membuat sekolah yang bernama Schakel School. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi setelah tamat dari sekolah desa terutama dalam berbahasa belanda. Masa belajar schakel school sendiri adalah lima tahun, setelah sekolah desa tiga tahun. Jadi, masa belajar seluruhnya delapan tahun dan dianggap setara dengan H.I.S. Peranan sekolah Schakel tidak kecil karena berfungsi sebagai jembatan penghubung antara sekolah desa dengan pendidik barat. Dengan adanya Schakel School ini maka perbedaan kelas masyarakat untuk memasuki sekolah Barat telah lenyap dan bahasa Belanda yang selama ini dianggap sebagai jurang pemisah telah berhasil dijembatani. Setelah terbukanya H.I.S untuk anak-anak pribumi maka mereka dapat melanjutkan ke sekolah menengah, terutama ke M.U.L.O. Dan tamatan dari sini dapat memasuki sekolah kejuruan. Dengan demikian, mereka dapat menduduki posisi yang baik di dalam masyarakat dimana sebelumnya diduduki oleh orang Belanda. 2) Sekolah lanjutan Beberapa kalangan melihat MULO saja belum cukup dan perlu ada sekolah

lanjutan hingga pada 1915 komisi yang dipimpin prof dr. J, Woltjer mengusulkan untuk dibentuknya sekolah menengah untuk bumiputera dengan nama indische middelbare school yang dianggap sama dengan tiga kelas tertinggi HBS dan lebih terkenal dengan sebutan AMS (Algemeene middlebare school) dengan lama belajar tiga tahun. AMS memiliki dua jurusan yakni (Afdeeling) A, untuk pengetahuan kebudayaan atau humaniora. Dan jurusan A sendiri dibagi lagi menajdi dua yakni A1 untuk sastra dan humaniora timur, A2 untuk klasik barat. Dan untuk jurusan (Afdeeling) B untuk pengetahuan pasti dan alam. Tamatan M.U.L.O dapat melanjutkan ke HBS. Dengan waktu lima tahun dan menduduki kelas IV. Baik M.U.L.O maupun HBS sebenarnya dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang kejuruan. Orang yang memiliki ijazah M.U.L.O memiliki arti penting karena mendapat posisi baik di dalam masyarakat. Selanjutnya AMS pun mengadakan pendidikan pertamanya pada tahun 1919 di Yogyakarta lengkap dengan dua jurusanya. Dan 1920 AMS juga mengadakan pendidikan di Bandung tapi hanya untuk jurusan A2. Dan 1926 AMS dengan jurusan sastra dan humaniora timur didirikan di Surakarta 1926. Kemudian sejak berdirinya A.M.S. sebagai lanjutan dari M.U.L.O. maka kesempatan untuk memasuki Perguruan Tinggi terbuka. 3) Sekolah tinggi Kemudian munculah sekolah tinggi yang pertama di Hindia Belanda untuk Teknik yang bersatatus swasta yaitu Technische Hoogeschool te Bandung pada Juli 1920 yang disusul dengan sekolah tinggi kedokteran dan sekolah tinggi hukum. Sekolah tinggi terbagi menjadi tiga, yaitu: Kedokteran Batavia 1927, ITB 1920, dan Recht Hoge School 1924. Dengan berdirinya sekolah tinggi ini maka lengkap sudah jenjang pendidikan yang ada di Hindia Belanda, walaupun dalam seluruh jenjang masih terdapat perbedaan dan pemilihan, perbedaan antar golongan berdasarkan status masyarakat dan kelas sosial dan pemilihan secara bahasa namun hal inilah yang nantikan menjadi tonggak bangkitnya kebangsaan Indonesia.

3. KESIMPULAN

Proses pendidikan yang berlangsung di Hindia Belanda adalah salah satu titik awal munculnya tokoh kebangkitan bangsa. Pendidikan di Hindia Belanda sendiri diawali karena

kritik dari beberapa tokoh dan golongan dengan diterapkan nya tanam paksa dan politik liberal, karena dalam kebijakan ini menimbulkan banyak penderitaan dan kemiskinan rakyat. Dan hal ini harus dibayar dengan menyelenggarakan trias yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kritikan ini pun akhirnya di setujui ratu Belanda, dan pendidikan pun mulai digelar namun pendidikan berjalan dengan diskriminasi karena terdapat sekolah yang membedakan kelas anatara anak elite bangsawan atau tokoh yang pro Belanda dengan anak rakyat biasa. Dan hal ini karena anak bangsawan atau tokoh pro belanda ini nantinya akan bekerja untuk membantu Belanda. Dan anak rakyat biasa hanya menjadi pekerja kasar atau rendahan. Namun pada periode 1900 hingga 1930 pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dimana pendidikan yang pada awalnya dibatasi dengan dengan kekuasaan pada waktu itu mulai melebur. Yang pada saat itu hanya lulusan HIS saja yang boleh melanjutkan ke sekolah lanjutan namun pada selang waktu setelahnya muncul lah beberapa sekolah dasar berbahasa belanda bagi lulusan sekolah desa contohnya vervolschool dan Schakel School dengan demikian mereka memiliki kesempatan untuk bisa melanjutkan ke sekolah kejuruan atau lanjutan walaupun masih terdapat pendiskriminasian. Dengan munculnya beberapa sekolah dasar berbahasa belanda bagi pribumi hal inilah yang menjadi titik awal perkembangan pendidikan bagi anak pribumi. Yang dulunya anak rakyat biasa hanya bisa sekolah sampai sekolah desa namun pada 1900-an anak rakyat biasa mulai dikenalkan dengan bahasa Belanda di beberapa sekolah sehingga bukan tidak mungkin lagi melanjutkan ke sekolah lanjutan bahkan hingga ke sekolah tinggi. Namun dengan catatan setiap jenjangnya selalu ada perbedaan dan pemilihan antar status dan golongan. Namun tetap hal inilah yang nanti mendorong munculnya beberapa tokoh kebangkitan nasional yang memiliki pemikiran luas yang mau membela rakyat Indonesia untuk merdeka. Dan menjadi titik awal perjuangan bangsa Indonesia menuju proses Merdeka.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Rahmat Hidayat, *Epistemologi Pendidikan Islam: Sistem, Kurikulum, Pembaharuan dan Upaya Membangun Epistemologi Pendidikan Islam,* Almufida Vol. 1 No. 1 2016.

Jurnal Alifia Nurhasana Afandi dkk, *Pendidikan Pada Masa Kolonial Di Hindia Belanda Tahun 1900-1930,* Jurnal Artefak Vol. 7 No. 2020.

Jurnal Nabila, *Tujuan Pendidikan Islam,* Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 2 No. 5 2021.

Jurnal Rohani dkk, *Pendidikan Islam Di Indonesia Masa Kolonial Belanda*, journal for southeast Asian Islamic Vol.. 18, No. 2, 2022.